

BAB II

LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN SUKARELA

2.1. Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan¹ paragraf 7 (IAI, 2012) menyatakan laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan juga mencakup skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen (IAI dalam Chariri & Ghozali, 2005).

Belkaoui (2006) meringkas tujuan laporan keuangan menurut APB no. 4 sebagai berikut:

1. Tujuan *khusus* dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan.
2. Tujuan *umum* dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan bisnis agar dapat:
 - i. mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;
 - ii. menunjukkan pendanaan dan investasinya;
 - iii. mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya;
 - iv. menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya;
 - (b) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat:
 - i. menyajikan ekspektasi pengembalian dividen kepada para investor;
 - ii. menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha;

- iii. memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kepada manajemen;
 - iv. menyajikan profitabilitas jangka panjang;
- (c) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
- (d) Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban.
- (e) Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan.
3. Tujuan *kualitatif* dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:
- (a) *Relevansi*, yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka.
 - (b) *Dapat dimengerti*, yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tetapi para pengguna juga harus dapat memahaminya.
 - (c) *Dapat diverifikasi*, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen, dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama.
 - (d) *Netralitas*, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna spesifik.

(e) *Ketepatan waktu*, yang artinya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

(f) *Komparabilitas (daya banding)*, yang secara tidak langsung berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan akuntansi keuangan yang diterapkan.

(g) *Kelengkapan*, yang artinya adalah telah dilaporkannya seluruh informasi yang 'secara wajar' memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif lain.

SFAC No. 2 secara lebih spesifik membagi karakteristik kualitatif laporan keuangan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

a. Karakteristik primer

- Relevansi

Relevansi adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan (Suwardjono, 2010). Laporan keuangan yang relevan dapat dipakai untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi (*predictive value*), mengevaluasi keputusan di masa lalu (*feedback value*), dan tersedia saat diperlukan oleh pemakai laporan keuangan (*timeliness*).

- Reliabilitas

Reliabilitas adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Suwardjono, 2010).

Tingkat reliabilitas laporan keuangan bergantung pada ketepatan simbol yang dipakai untuk menyatakan fenomena yang sesungguhnya terjadi (*representational faithfulness*) dan kemampuan informasi diuji kebenarannya untuk menambah keyakinan pemakai keuangan (*verifiability*).

b. Karakteristik sekunder

- Netralitas

Netralitas adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketakberbiasan dalam perlakuan akuntansi (Suwardjono, 2010). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak ditujukan untuk menguntungkan, mengarahkan, atau menghindari konsekuensi dari grup tertentu.

- Dapat diperbandingkan dan konsistensi

Karakteristik ini didefinisikan sebagai kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik (Suwardjono, 2010). Laporan keuangan yang konsisten adalah laporan keuangan yang memiliki kesesuaian peraturan dan prosedur akuntansi dari waktu ke waktu.

IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 paragraf 9 (IAI, 2012) mengidentifikasi pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan

keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda, yang meliputi :

- *Investor.* Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden.
- *Karyawan.* Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja dan kesempatan kerja.
- *Pemberi pinjaman.* Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar saat jatuh tempo.
- *Pemasok dan kreditur usaha lainnya.* Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman

kecualikalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.

- *Pelanggan.* Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.
- *Pemerintah.* Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- *Masyarakat.* Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.

2.2. Pengungkapan

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pengungkapan

Pengungkapan secara sederhana didefinisikan sebagai penyampaian informasi. Hendriksen & Breda (1991) menyatakan secara sederhana,

pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*). Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan (Suwardjono, 2010). Ada tiga tujuan pengungkapan yaitu (Suwardjono, 2010) :

(a) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan.

(b) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan kecanggihan tertentu.

(c) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Belkaoui menyatakan tujuan-tujuan dari pengungkapan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
2. Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
3. Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
4. Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun.
5. Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau keluar di masa depan.
6. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

2.2.2. Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen (laporan) keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2010). Suwardjono (2010) menyatakan metode-metode yang dipakai dalam pengungkapan adalah:

- Pos Statemen (Laporan) Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen (laporan) keuangan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian (jenis statemen, format statemen, kalsifikasi pos, dan susunan pos). Jenis statemen meliputi neraca, statemen laba-rugi, dan statemen perubahan ekuitas, dan statemen aliran kas.

- Catatan Kaki

Catatan kaki (*footnotes*), atau catatan atas statemen keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan. Catatan atas statemen keuangan menjadi bagian integral dari statemen keuangan secara keseluruhan.

- Penjelasan dalam Kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos atau elemen dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukannya suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung.

- Istilah Teknis

Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul (*captions*), atau subjudul. Nama elemen merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan objek penting dalam akuntansi.

- Lampiran

Statemen keuangan merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategis. Dengan demikian, statemen keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian, statemen tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statemen utama.

- Komunikasi Manajemen

Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan *management's discussion and analysis (MDA)*.

- Catatan dalam Laporan Auditor

Pengungkapan yang bermanfaat dapat pula dilakukan oleh pihak lain yaitu auditor independen. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum secara otomatis akan terrefleksi dalam statemen (laporan) keuangan.

2.2.3. Luas Pengungkapan

Luas informasi yang diungkapkan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu (Hendriksen & Breda, 1991):

(a) Pengungkapan memadai (*adequate disclosure*)

Tingkatan ini adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

(b) Pengungkapan wajar (*fair disclosure*)

Tingkatan ini adalah tingkat dimana semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama.

(c) Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Tingkatan ini adalah tingkat penyajian secara penuh tentang semua informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Dilihat dari keharusannya, pengungkapan dibagi menjadi dua kategori :

(a) Pengungkapan Wajib

Pengungkapan informasi-informasi yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah.

(b) Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan informasi-informasi diluar dari yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah.

2.3. Pengungkapan Sukarela

Berbeda dengan pengungkapan wajib, dalam pengungkapan sukarela perusahaan bebas memilih apa saja informasi yang akan mereka sajikan. Suwardjono (2010) menjelaskan tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan karena terlalu banyak informasi sama tidak menguntungkannya dengan terlalu sedikit informasi. Batas atas (*cost > benefit*) dan batas bawah (materialitas) dalam karakteristik kualitatif informasi untuk pengakuan suatu pos dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan banyaknya informasi.

2.3.1. Teori yang Mendasari Pengungkapan Sukarela

2.3.1.1. Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Prinsipal (pemegang saham) menyewa dan mendelegasikan wewenang kepada agen (CEO) dengan harapan agen akan bertindak sesuai keinginan prinsipal. Hubungan ini menimbulkan tantangan yaitu bagaimana memotivasi agen agar memiliki tingkat produktifitas seperti pemilik perusahaan. Tujuan utama dalam hubungan keagenan adalah terciptanya keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara prinsipal dan agen. Berdasarkan asumsi semua tindakan individu didasarkan atas kepentingannya sendiri, terdapat konflik antar prinsipal dan agen mengenai perbedaan preferensi dan risiko. Agen tidak hanya tertarik akan kompensasi keuangan namun juga dari hubungan dengan prinsipal. Berbeda dengan prinsipal yang dianggap hanya tertarik dengan *return* keuangan atas investasinya di perusahaan. Dari segi risiko, agen cenderung segan risiko, sedangkan prinsipal netral risiko.

Agen dengan wewenangnya sebagai eksekutif perusahaan memiliki informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan sesungguhnya. Prinsipal yang tidak setiap saat memantau aktivitas agen, memiliki pengetahuan yang kurang mengenai tindakan agen di perusahaan. Dalam rangka memenuhi keselarasan tujuan, prinsipal harus tahu apa saja yang dilaksanakan agen. Inilah yang disebut dengan asimetri informasi, yaitu adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut diperlukan transfer informasi lewat publikasi lewat media-media.

2.3.1.2. Signalling Theory

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangan manajemen sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

2.3.1.3. Political Theory

Teori ini menyatakan perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk menghindari persepsi buruk dari masyarakat. Sebagai contoh perusahaan tambang akan mengungkap informasi mengenai lingkungan pertambangan secara lebih luas untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat bahwa perusahaan tambang merusak lingkungan.

2.3.1.4. Legitimacy Theory

Teori ini menyatakan perusahaan melakukan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa nilai-nilai yang dianut perusahaan sudah sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

2.3.1.5. Stakeholder Theory

Teori ini menyatakan dengan beragamnya tingkat pemangku kepentingan (*stakeholder*), perusahaan harus mampu melayani kepentingan-kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut. Teori ini memiliki dua pandangan. Pandangan pertama disebut *Organization Centered Perspective*, yang memandang perusahaan hanya menyajikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan yang utama demi menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pandangan kedua disebut *Accountability Perspective* yang menganggap perusahaan harus memperhatikan hak seluruh pemangku kepentingan dan pengungkapan sukarela ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

2.3.2. Motif Pengungkapan Sukarela

Haely & Palepu (2001) mengungkapkan enam motif pengungkapan sukarela, yaitu *capital markets transaction hypothesis*, *corporate control contest hypothesis*, *stock compensation hypothesis*, *litigation cost hypothesis*, *management talent signalling hypothesis*, dan *proprietary cost hypothesis*.

Berikut penjelasan mengenai keenam hal tersebut :

2.3.2.1. *Capital markets transaction hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan perusahaan yang hendak menerbitkan saham, surat utang atau instrumen keuangan lain harus membuat pengungkapan untuk memengaruhi persepsi investor. Pengungkapan menjadi sarana untuk membangun kepercayaan investor dan pada akhirnya mengurangi asimetri informasi.

2.3.2.2. *Corporate control contest hypothesis*

Manajemen menghadapi risiko ketika perusahaan mengalami kondisi yang buruk seperti harga saham yang turun. Manajemen dapat kehilangan kepercayaan dari pemegang saham dan kehilangan posisinya di perusahaan. Kondisi tersebut memicu manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela tentang alasan dan penyebab kondisi buruk yang dialami perusahaan sekaligus untuk mengurangi penilaian buruk terhadap manajemen.

2.3.2.3. *Stock compensation hypothesis*

Perusahaan yang memiliki kebijakan kompensasi saham kepada manajemen memiliki tujuan agar manajemen bertindak sebagai eksekutif sekaligus pemilik perusahaan. Kondisi tersebut dapat memotivasi pengungkapan sukarela oleh manajemen. Pertama, manajemen melakukan pengungkapan sukarela agar nilai saham terkoreksi sesuai informasi yang ada serta menghindari dugaan *insider trading*. Kedua, dari sudut pandang pemilik perusahaan, pengungkapan sukarela dapat mencegah penilaian yang salah terhadap saham perusahaan sehingga dapat menekan biaya kontrak atas pemberian kompensasi saham.

2.3.2.4. *Litigation cost hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan hukum dan aturan yang berlaku di wilayah perusahaan berdiri. Luas pengungkapan sukarela ditingkatkan untuk mengurangi risiko perusahaan terkena tuntutan hukum yang berlaku.

2.3.2.5. *Management talent signalling hypothesis*

Manajemen yang memiliki kemampuan baik akan mengungkap *forecast* pendapatan perusahaan dengan sukarela. Informasi tersebut akan menaikkan persepsi investor terhadap perusahaan serta berdampak pada naiknya nilai perusahaan.

2.3.2.6. *Proprietary cost hypothesis*

Dalam membuat keputusan terkait pengungkapan sukarela, manajer mengidentifikasi sifat persaingan antarusaha dalam industri yang sama. Perusahaan yang tingkat kinerjanya relatif sama dengan perusahaan lain akan mengungkap informasi lebih banyak dibanding perusahaan yang berada dalam industri yang kinerjanya lebih variatif.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu di Bab I Pendahuluan.

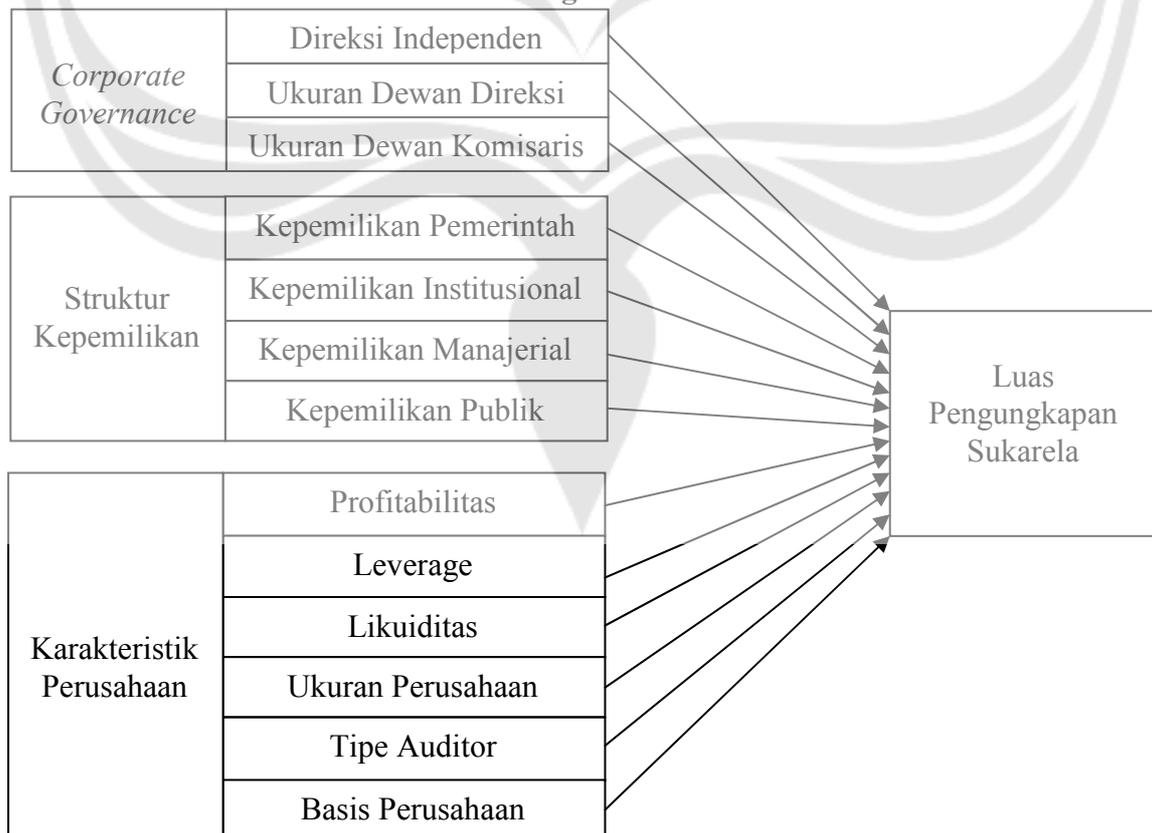
2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan faktor-faktor yang diteliti terhadap pengungkapan sukarela serta faktor yang

paling dominan memengaruhi luas pengungkapan sukarela. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga kelompok yaitu, faktor-faktor yang terkait dengan *corporate governance*, struktur kepemilikan perusahaan, dan karakteristik perusahaan. Faktor *corporate governance* diproksikan dengan proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan komisaris. Faktor struktur kepemilikan perusahaan diproksikan dengan kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik. Faktor karakteristik perusahaan diproksikan dengan profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, tipe auditor, dan basis perusahaan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Hipotesis 1

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan cenderung netral terhadap risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Fungsi pengawasan yang diemban oleh komisaris diharapkan akan semakin bermanfaat dengan jumlah anggota independen yang tinggi. Forker (1992 dalam Ho & Wong 2001) menemukan bahwa semakin tinggi persentase direksi independen meningkatkan fungsi monitoring atas kualitas pengungkapan sukarela dan mengurangi motif untuk menahan informasi. Independensi komisaris juga mendorong perusahaan untuk mengungkap lebih banyak informasi ke pemegang saham lain (Eng & Mak, 2003). Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memainkan peran penting dalam proses pelaporan keuangan dengan *'overseeing and monitoring management'* (Utomo, 2011). Hasil penelitian Leung & Horwitz (2004), Patelli & Prencipe (2007), Donnelly & Mulchany (2008), Clemente & Labat (2009), Yuen *et. al.* (2009), Baek *et. al.* (2009), Garcia-Meca & Sanchez Ballesta (2010), dan Salteh *et. al.* (2011) menemukan pengaruh positif komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis 1 untuk penelitian ini adalah :

H₁ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.2. Hipotesis 2

Di dalam struktur kepemimpinan sebuah perusahaan, di Indonesia menerapkan sistem dua dewan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Struktur tersebut berbeda dengan yang diterapkan di negara lain, yang umumnya menerapkan satu dewan. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan direksi sebagai berikut :

Direksi adalah Organ Perseroan yang benwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan, tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi berperan sebagai pelaksana aktivitas perusahaan sehari hari (peran eksekutif). John & Sanbet (dalam Clemente & Labat, 2009) menyatakan bahwa jumlah dewan yang lebih banyak akan meningkatkan kapasitas pemantauan perusahaan. Umumnya dewan direksi terdiri dari direksi-direksi yang membidangi satu bidang tertentu. Pembagian wewenang tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penghimpunan informasi. Penghimpunan serta aliran informasi yang memadai pada direktur masing-masing bidang dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.3. Hipotesis 3

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia menganut sistem dua dewan. Salah satu dewan tersebut, yaitu dewan komisaris, menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1, didefinisikan sebagai berikut :

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris perusahaan berwenang untuk melakukan pengawasan baik secara umum ataupun khusus atas tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh direksi. John dan Senbet (1998, dalam Clemente & Labat 2009) mengatakan, tingkat efektivitas dewan bergantung pada tiga hal yaitu, komposisi, independensi, dan ukuran dewan. Semakin besar ukuran dewan akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan memiliki anggota dewan independen (Matolcsy *et. al.*, dalam Clemente & Labat, 2009). Keberadaan komisaris independen yang lebih banyak akan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Dengan demikian hipotesis 3 untuk penelitian ini adalah :

H₃ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.4. Hipotesis 4

Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah memiliki tujuan yang berbeda dengan perusahaan bisnis pada umumnya. Perusahaan bisnis akan berusaha mencapai keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan pemerintah terkadang bertindak demi kepentingan nasional. Perbedaan orientasi tersebut dapat mengurangi ketertarikan pemegang saham lain terhadap perusahaan. Eng & Mak (2003) menyatakan, meningkatkan nilai pemegang saham bisa jadi bukan menjadi tujuan utama perusahaan pemerintah. Perusahaan yang dimiliki pemerintah juga menerima pendanaan dan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya pemerintah, sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan non-pemerintah (Eng & Mak 2003). Jiang (2009 dalam Yuen *et. al.* 2009) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan di Selandia Baru yang dimiliki oleh pemerintah memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Pengungkapan yang lebih luas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya ketertarikan pemegang saham lain karena perbedaan orientasi perusahaan milik pemerintah. Penelitian Eng & Mak (2003), Prayogi (2003), dan Yuen *et. al.* (2009) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.5. Hipotesis 5

Institusi yang memiliki kepemilikan saham yang besar di sebuah perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memonitor praktek pengungkapan perusahaan (Eng & Mak, 2003). Donnelly & Mulcahy (2008) menyatakan ada tiga karakteristik pemegang saham institusional dalam sebuah perusahaan yaitu (1) memiliki insentif dan kemampuan untuk mendapatkan pengungkapan informasi-informasi awal secara tepat waktu; (2) lebih mampu untuk mengevaluasi keputusan-keputusan finansial yang diambil oleh manajemen; (3) memiliki hak suara yang lebih besar, sehingga mempermudah untuk mengoreksi langkah-langkah yang dilakukan direksi bila dirasa perlu. Manajemen perusahaan harus menyediakan berbagai macam informasi sesuai kebutuhan pemilik institusional dengan karakteristik-karakteristik spesifik tersebut. Dengan demikian hipotesis 5 penelitian ini adalah :

H₅ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.6. Hipotesis 6

Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan sehari-hari sangat paham betul mengenai kondisi riil perusahaan. Manajemen akan memiliki informasi-informasi yang belum tentu dimiliki pihak lain, termasuk dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya informasi tersebut. Informasi apa yang akan diterbitkan maupun informasi apa yang harus

disembunyikan menjadi hak manajemen untuk mengeluarkannya, kecuali informasi tersebut diwajibkan oleh pihak berwenang. Saat manajemen menjadi pemilik perusahaan (pemegang saham), tekanan untuk mengungkap informasi yang disembunyikan akan berkurang. Hal tersebut dikarenakan manajemen dalam kedudukannya sebagai pemilik dapat menuntut atau tidak menuntut pengungkapan informasi tertentu. Hasil penelitian Eng & Mak (2003), Donnelly & Mulcahy (2008), Baek *et. al.* (2009), dan Rouf & Al Harun (2011) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Ruland *et al.* (1990 dalam Donnelly & Mulcahy 2008) menemukan bahwa saat kepemilikan manajerial meningkat, informasi prakiraan pendapatan perusahaan yang dikeluarkan manajemen akan berkurang. Hipotesis 6 untuk penelitian ini adalah :

H₆ : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.7. Hipotesis 7

Perusahaan yang sudah *go public* memiliki tanggung jawab kepada masyarakat umum untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kondisi perusahaan. Semakin besar kepemilikan publik, semakin luas pula pengungkapan sukarela perusahaan. Kondisi ini didasarkan pada alasan, bahwa pemegang saham publik ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan tempat ia berinvestasi. Selain itu

umumnya investor ingin mengawasi kegiatan manajemen sehingga kepentingannya dalam perusahaan dapat terpenuhi, untuk itulah mereka membutuhkan informasi yang seluas-luasnya (Nor Hadi, 2001). Pemegang saham publik juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta memiliki ketertarikan yang berbeda-beda pula. Pengungkapan informasi yang lebih luas menjadi media untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham publik tersebut. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah :

H₇ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.8. Hipotesis 8

Tingkat keuntungan perusahaan merupakan indikator kunci dari kinerja perusahaan. Laba menjadi hal yang paling diharapkan oleh investor dari aktivitas investasinya. Dilihat dari perspektif teori agensi, pihak manajemen dari perusahaan yang sangat *profitable* akan memakai informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi (Inchausti dalam Barako *et. al.* 2006). Manajemen akan mengungkap informasi mendetil sebagai media untuk menunjukkan prestasi mereka dan kompensasi yang akan mereka dapatkan atas keuntungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kinerja diatas rata-rata perusahaan lain (Foster dalam Meek *et. al.* 1995). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghimpun modal lebih banyak dari investor (Foster dalam Meek *et. al.* 1995) dan

meningkatkan nilai perusahaan (Barako *et. al.* 2006). Profitabilitas yang lebih tinggi juga memotivasi manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih untuk meningkatkan kepercayaan investor (Rouf & Al Harun 2011). Perusahaan yang mengalami profitabilitas rendah, cenderung untuk menyembunyikan alasan penurunan tersebut dengan mengungkap informasi lebih sedikit (Hardiningsih, 2008). Barako *et. al.* (2006) juga menyatakan bahwa perusahaan yang kinerjanya buruk mungkin mengungkapkan informasi yang lebih sedikit untuk menyembunyikan kinerja buruknya dari para pemegang saham. Hasil penelitian Agca & Onde (2007) dan Pristiwati & Widianingsih (2011) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₈ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.9. Hipotesis 9

Rasio *leverage* (proporsi hutang terhadap ekuitas) menunjukkan dari mana dana yang didapat perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu hutang (Prastowo & Juliaty dalam Almilia & Retrinasari 2007). Meek *et. al.* (1995) menyatakan biaya keagenan akan meningkat saat perusahaan memiliki proporsi hutang yang tinggi dalam struktur modalnya. Semakin

tinggi hutang perusahaan semakin besar risiko tak tertagihnya hutang tersebut. Prinsipal ingin mengetahui apakah tindakan yang sudah dilakukan manajemen perusahaan tidak mengarah pada risiko tak tertagihnya hutang tersebut. Pengungkapan sukarela menjadi cara untuk mengurangi biaya keagenan tersebut dengan cara memberikan informasi kepada prinsipal. Wallace *et. al.* (dalam Setiawan 2001) menyatakan perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung mengungkap informasi lebih luas untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kreditur. Schipper (dalam Setiawan 2001) menyatakan, tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₉ : Leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.10. Hipotesis 10

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan (Almilia & Retrinasari 2007). Wallace *et. al.* (dalam Setiawan 2001) menyatakan likuiditas diharapkan berhubungan dengan luas pengungkapan, karena kemungkinan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih

rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi. Argumen yang berbeda ditunjukkan oleh Nor Hadi (2001). Pengungkapan yang lebih luas akan dilakukan oleh perusahaan yang likuiditasnya baik, bukan oleh perusahaan yang likuiditasnya rendah. Kondisi itu didasarkan pada alasan bahwa bagi perusahaan yang memiliki likuiditas baik, menunjukkan struktur financial yang baik pula. Jika seandainya kondisi itu diketahui publik, maka perusahaan tidak merasa akan terancam kinerjanya, bahkan jika likuiditas perusahaan diketahui oleh pihak luar, secara langsung atau tidak langsung perusahaan telah menunjukkan validitas kinerjanya (Nor Hadi 2001). Barako *et. al.* (2006) menyatakan hubungan likuiditas terhadap pengungkapan sukarela belum dapat dipastikan pengaruhnya, karena likuiditas tinggi perlu diungkapkan, dan likuiditas rendah juga perlu diungkapkan. Hasil penelitian sebelumnya juga belum konsisten. Prayogi (2003) dan Pristiwati & Widianingsih (2011) menemukan likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian Barako *et. al.* (2006) dan Almilia & Retrinasari menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis untuk penelitian ini adalah

H₁₀ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.11. Hipotesis 11

Foster (dalam Meek *et. al.* 1995) dan Suwardjono (2010) menyatakan ukuran perusahaan menjadi variabel yang paling konsisten berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Perusahaan besar cenderung mengungkap lebih banyak informasi dibanding perusahaan kecil. Ada beberapa argumen yang bisa menjelaskan hal tersebut. Pertama, perusahaan besar memiliki sebaran pemegang saham yang lebih luas dan kompleks. Hal tersebut menimbulkan biaya keagenan yang lebih tinggi, sehingga pengungkapan yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Jensen & Meckling dalam Meek *et. al.* 1995). Kedua, perusahaan besar lebih sensitif terhadap *political costs* (Watts & Zimmerman dalam Meek *et. al.* 1995). Ketiga, pada umumnya perusahaan besar mengungkap lebih banyak informasi karena memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan kecil (Setiawan, 2001). Keempat, perusahaan besar memiliki biaya informasi yang lebih rendah (Setiawan, 2001). Kelima, perusahaan besar dapat mengungkap informasi lebih luas karena didukung oleh sistem pelaporan manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten (Setiawan, 2001). Kelima hal tersebut umumnya tidak dimiliki oleh perusahaan kecil. Almilia & Retrinasari (2007) menyatakan perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan

perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain sehingga mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan sehingga perusahaan kecil cenderung tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Almilia & Retrinasari, 2007). Penulis menemukan 13 penelitian sebelumnya yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela (Firth, 1979; Chow & Wong-Boren, 1987; Meek *et. al.*, 1995; Setiawan, 2001; Nor Hadi, 2001; Eng & Mak, 2003; Prayogi, 2003; Kusumawati, 2006; Boesso & Kumar, 2006; Agca & Onde, 2007; Mujiono & Nany, 2010; Varghese, 2011; dan Utomo, 2011). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H₁₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.12. Hipotesis 12

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan memiliki peran untuk memastikan penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal merupakan bagian penting dalam menjaga pelaporan keuangan agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan *Good Corporate governance* (Utomo, 2011). Peran auditor eksternal cukup besar dalam perusahaan terkait jasa audit yang dilakukan KAP. Peran

tersebut dapat memengaruhi kebijakan perusahaan tentang pengungkapan informasi. KAP sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu KAP Big-Four dan KAP non Big-Four. Pengelompokan KAP Big-Four tersebut didasarkan pada empat KAP terbesar di dunia. DeAngelo (dalam Barako *et. al.*, 2006) berpendapat bahwa auditor yang masuk kedalam kelompok Big Four memiliki kualitas dan reputasi yang lebih baik dibanding auditor kecil. Owusu-Ansah (dalam Barako *et. al.* 2006) menyatakan bahwa auditor besar memiliki lebih banyak klien sehingga mengurangi ketergantungan auditor pada sejumlah kecil kliennya. Hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas audit. Penelitian Kusumawati (2006), Agca & Onde (2007) menemukan bahwa tipe auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah :

H₁₂ : Tipe auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

2.6.13. Hipotesis 13

Perusahaan asing memiliki beberapa perbedaan dengan perusahaan dalam negeri. Pertama, perusahaan asing memiliki pemegang saham yang lebih beragam latar belakangnya dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri. Kondisi tersebut turut meningkatkan permintaan informasi dari pemegang saham ke perusahaan yang mengakibatkan pengungkapan informasi yang lebih luas (Choi and Mueller dalam Meek

et. al. 1995). Kedua, perusahaan asing mendapat pelatihan yang lebih baik, punya sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induk, dan perusahaan asing mendapat permintaan informasi yang lebih luas dari pelanggan pemasok analis dan masyarakat umum (Setiawan, 2001). Penelitian sebelumnya dari Nor Hadi (2001) dan Hardiningsih (2008) menunjukkan adanya pengaruh positif basis perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah :

H₁₃ : Basis perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela